

## Keberdayaan Masyarakat Putus Sekolah Di Era Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Syaifudin<sup>a,1</sup>

Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup> [syaifudin@unj.ac.id](mailto:syaifudin@unj.ac.id)\*

### ABSTRAK

Ketidakpastian kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19 menuntut manusia bertahan dalam segala keterbatasan. Akan tetapi dunia sekolah yang di anggap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, justru sebaliknya makin sulit di akses oleh masyarakat, khususnya masyarakat kecil kebawah. Terbukti tiap tahunnya angka putus sekolah selalu mengalami kenaikan. Oleh karena itu guna memberikan modal sosial kepada anak yang putus sekolah ini, maka diperlukan pelatihan ketrampilan kerja. Dengan pelatihan ketrampilan kerja ini, setidaknya anak yang putus sekolah itu memiliki modal untuk melamar pekerjaan atau berwirausaha. Salah satu wilayah yang termasuk bagian dari anak yang putus sekolah ini yaitu wilayah RT. 006, RW. 014 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Karena hampir 20% remaja di wilayah ini mengalami putus sekolah, baik dari SD, SMP, maupun SMA. Bahkan ada yang sama sekali tidak sekolah. Maka tidak heran banyak remaja di wilayah ini yang menganggur. Oleh sebab itu untuk meminimalisir tingkat pengangguran di wilayah ini, maka diperlukan sebuah pembekalan ketrampilan bagi para remaja yang putus sekolah ini. Agar nantinya mereka memiliki modal ketrampilan tambahan untuk melamar pekerjaan atau bahkan berwirausaha sendiri.

### ABSTRACT

*The uncertainty of economic conditions during the Covid-19 pandemic requires humans to survive in all limitations. However, the world of schools is considered to be able to improve the quality of human resources, on the contrary, it is increasingly difficult to access by the community, especially the lower class community. It is proven that every year the dropout rate always increases. Therefore, in order to provide social capital to these out-of-school children, job skills training is needed. With this job skills training, at least the children who drop out of school have the capital to apply for jobs or become entrepreneurs. One of the areas that is part of the children who drop out of school is the RT area. 006, RW. 014 Cengkareng Barat Village, West Jakarta. Because almost 20% of teenagers in this area have dropped out of school, both from elementary, junior high, and high school. Some even don't go to school at all. So it is not surprising that many youths in this region are unemployed. Therefore, in order to minimize the unemployment rate in this region, it is necessary to provide a skill set for these teenagers who drop out of school. So that later they have additional skill capital to apply for jobs or even become their own entrepreneurs.*

### Pendahuluan

Ketidakpastian kondisi ekonomi menuntut manusia bertahan dalam segala keterbatasan. Secara filosofi, manusia merupakan makhluk yang memiliki akal. Di mana akal tersebut digunakan untuk melakukan sebuah proses bertahan hidup. Untuk itu, masyarakat harus bisa menggunakan segala potensinya demi menuju masyarakat yang homeostatis. Berdasarkan hasil *Human Development Indeks* (HDI) UNDP 2020, posisi Indonesia dalam peringkat daya saing bangsa di dunia internasional berada di peringkat 107 dari 189 negara. Jika dilihat dalam konteks negara-negara tetangga di Asia Tenggara, HDI Indonesia menduduki

### Informasi Artikel

Diterima: 04-03-2021

Disetujui: 24-04-2021

### Kata kunci:

Keberdayaan masyarakat, Putus sekolah, Pemberdayaan masyarakat

### Article's Information

Received: 04-03-2021

Accepted: 24-04-2021

### Keywords:

Community Empowerment; Dropout; Community development.



peringkat kelima. HDI Indonesia kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Data ini jelas mengindikasikan bahwa masih rendahnya daya saing bangsa. Apalagi dunia sekolah yang di anggap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, justru sebaliknya makin sulit di akses oleh masyarakat, khususnya masyarakat kecil kebawah. Terbukti tiap tahunnya angka putus sekolah selalu mengalami kenaikan. Walaupun secara teori sudah diterapkan sekolah gratis, namun realitanya masih banyak anak yang sulit mengakses dunia pendidikan. Hal ini diperparah dengan disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Di mana lembaga pendidikan di ibaratkan layaknya sebuah perusahaan. Maka secara otomatis pembiayaan yang berkaitan dengan keperluan sekolah, harus ditanggung oleh pihak sekolah. Dengan cara pihak sekolah mencari pemasukan lain diluar anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Dampaknya adalah pihak sekolah mau tidak mau menarik biaya sekolah yang cukup tinggi kepada peserta didik. Alhasil tingkat putus sekolah atau anak yang tidak dapat mengeyam dunia pendidikan semakin meningkat.

Ironisnya mereka yang putus sekolah atau yang tidak sekolah dianggap orang kelas dua dalam tataran struktur sosial. Hal ini disebabkan karena minimnya ilmu pengetahuan dan ketrampilan formal yang mereka miliki. Ditambah lagi pihak pemerintah yang terkadang mengabaikan keberadaan mereka. Adanya lembaga pelatihan tenaga kerja yang diadakan oleh pemerintah terkadang di anggap sebagian masyarakat masih sulit untuk di akses. Sebab ada saja oknum yang kadang memanfaatkan kegiatan tersebut dengan penarikan biaya yang mahal. Selain itu untuk dapat mengikuti pelatihan di lembaga-lembaga khusus ketrampilan yang ada tentu memerlukan biaya yang tidak cukup sedikit. Maka makin sulitlah ruang gerak mereka yang menginginkan ketrampilan nonformal untuk modal mereka bersaing di dunia kerja. Peran pemerintah lokal pun tidak terlalu signifikan dalam mengakomodasi permasalahan yang ada. Padahal pemerintah mempunyai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang jika dijalankan dengan baik dan konsisten, maka akan menciptakan kemandirian lokal masyarakat dalam menciptakan ekonomi kreatif. Tapi ironis, justru program itu tidak mereka dapatkan secara real. Karena rendahnya pendidikan mereka dan minimnya ketrampilan yang dikuasai, alhasil pengangguran menjadi jawaban dari masalah ini.

Pada satu sisi, tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan (Carlos, 2021). Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri (Kenny, 2011). Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Terkait dengan tujuan dari pemberdayaan, hal ini sebagaimana yang dikemukakan Adi (2013), bahwa tujuan dari pemberdayaan yaitu membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat memiliki daya kemampuan untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan

kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (1999) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Maka untuk itulah agar masyarakat berdaya, perlu dilakukan intervensi sosial. Metode intervensi sosial dapat diartikan sebagai suatu cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, masyarakat) untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui mengembalikan keberfungsian sosialnya supaya dapat menjalani kehidupannya secara mandiri. Menurut Alamsyah (2015: 173), intervensi sosial adalah suatu upaya untuk membantu manusia yang mengalami gangguan internal dan eksternal yang menyebabkan orang tidak dapat menjalankan peran sosialnya dengan baik. Pada intervensi, masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat namun tidak melewati batasan-batasan norma yang ada.

Pada pengembangan masyarakat lebih memberi penekanan pada *process goal* (tujuan yang berorientasi pada proses), dimana suatu komunitas mengembangkan kemampuan atau kapasitasnya di dalam pembangunan masyarakat. Proses pengelolaan sumber daya masyarakat merupakan strategi pembangunan masyarakat yang memberikan peran dominan kepada masyarakat ditingkat komunitas, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya yang produktif. Melalui strategi tersebut, masyarakat dapat mengembangkan sumber daya yang ada, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya yang dimaksud, dapat berupa energi atau tenaga masyarakat, kreatifitas (*skill*), teknologi, informasi dan hal yang dapat mendukung lainnya seperti tanah, air, pohon, lingkungan yang dapat dimanfaatkan sumber potensinya untuk dapat dikembangkan. Menurut Rothman (1995) bahwa proses intervensi sosial dapat dilakukan melalui beberapa model (pendekatan) intervensi, seperti pengembangan masyarakat kecil, perencanaan dan kebijakan sosial serta aksi sosial.

Salah satu komunitas masyarakat yang memerlukan intervensi social, yaitu remaja putus sekolah di wilayah RT. 006, RW. 014 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Wilayah RT. 006, RW. 014 secara administratif terletak di Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Berdasarkan data tahun 2020 dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya, Jakarta Barat dihuni oleh 1.633.829 jiwa. Sedangkan wilayah Cengkareng Barat sendiri jumlah penduduknya sekitar 12.960 jiwa. Penduduk di wilayah ini mayoritas berprofesi karyawan pabrik. Wilayah RT. 006, RW. 014 secara geografis memang strategis dekat dengan Bandara Soekarno Hatta dan kawasan industri Miami-Tegal Alur. Selain itu juga dekat dengan pertokoan Taman Palem dan pusat perbelanjaan Carrefour. Walaupun banyak sumber ekonomi, namun pengangguran memang menjadi masalah besar di wilayah ini. Pasalnya akses lapangan kerja harus terbentur dengan kualifikasi latarbelakang pendidikan yang minimal lulusan SLTA. Sedangkan hampir 20% remaja di wilayah ini mengalami putus sekolah, baik dari SD, SMP, maupun SMA. Bahkan ada yang sama sekali tidak sekolah. Maka tidak heran banyak remaja di wilayah ini yang menganggur. Akibat dari fenomena pengangguran itu, tidak jarang dari mereka terjerat dengan pemakaian narkoba dan mabuk-

mabukan, sebagai proses pengalihan diri. Hal itu terjadi karena alienasi diri yang terjadi di lingkungan mereka. Sehingga mereka membuat peran sosial sendiri dalam realita sosialnya. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir tingkat pengangguran di wilayah ini, maka diperlukan sebuah pembekalan ketrampilan bagi para remaja yang putus sekolah ini. Agar nantinya mereka memiliki modal ketrampilan tambahan untuk melamar pekerjaan atau bahkan berwirausaha sendiri. Di sinilah penulis mencoba memberikan sebuah bentuk pelatihan ketrampilan, dalam bidang komputer khususnya mengenai desain grafis dan ditambah pelatihan teknik cetak digital. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, pelatihan desain grafis ini merupakan pembekalan ketrampilan yang berorientasi pada aspek Iptek. Sehingga diharapkan dari pelatihan ini, mereka dapat mengetahui dan menguasai Iptek. Sebab era globalisasi menuntut masyarakat untuk dapat menguasai Iptek. Selain itu diharapkan dari pelatihan ini dapat meningkatkan ketrampilan mereka sehingga mereka nantinya memiliki modal tambahan dalam melamar pekerjaan. Sebab untuk mendidik rakyat yang mandiri dan memiliki daya saing bukanlah dengan cara memberi mereka uang, akan tetapi membekali mereka dengan ketrampilan dan ilmu pengetahuan.

Apalagi desain grafis merupakan salah satu ekonomi kreatif yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Ekonomi kreatif adalah sebuah talenta baru yang mengubah masyarakat melalui ide atau gagasan kreatif, sehingga menghasilkan produk-produk bernilai tambah ekonomi yang mampu menghasilkan kehidupan lebih sejahtera (Saksono, 2012: 93). Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Sistem ekonomi kreatif diyakini mampu menjadi solusi dalam mengatasi masalah ekonomi, sekaligus sebagai alternatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang akan menggeser sistem ekonomi yang telah berjalan. Indonesia yang kaya akan budaya dan berpenduduk besar mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif telah berkembang menjadi sebuah fenomena dalam menghadapi perkembangan dan tantangan globalisasi. Faktor teknologi informasi membuat perkembangan ekonomi kreatif menjadi lebih cepat, sehingga ekonomi kreatif menjadi sebuah jawaban atas tantangan dalam mensejahterakan masyarakat selain itu juga ekonomi kreatif dapat menurunkan tingkat pengangguran. Ekonomi kreatif akan memberikan nilai tambah, baik pada proses produksi maupun kepada sumber daya manusia sehingga sistem ekonomi kreatif diyakini akan menjawab tantangan dari berbagai permasalahan yang ada saat ini.

Ekonomi kreatif sangat potensial dan penting untuk dikembangkan di Indonesia. Mari Elka Pangestu (2008) dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 menyebutkan beberapa alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia, antara lain: (1) Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan; (2) Menciptakan iklim bisnis yang positif; (3) Membangun citra dan identitas bangsa; (4) Berbasis kepada sumber daya yang terbarukan; (5) Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa; dan (6) Memberikan dampak sosial yang positif. Salah satu alasan dari pengembangan industri kreatif adalah adanya dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga berdampak pada citra suatu kawasan tersebut.

Untuk itulah perlu dilakukan intervensi sosial dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu: (a) Memberikan ketrampilan tambahan bagi remaja yang putus sekolah untuk modal tambahan mereka dalam memasuki dunia kerja; (b) Membantu para remaja yang putus sekolah untuk dapat berwirausaha sendiri dengan ketrampilan yang

dimilikinya; dan (c) Sebagai bentuk pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi secara konkret. Sedangkan manfaat kegiatan ini adalah: (a) Bagi masyarakat, manfaat kegiatan ini sangatlah membantu mereka dalam menambah ketrampilan yang berkaitan dengan bidang desain grafis. Apalagi bidang ini memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Ditambah lagi bidang ini merupakan bagian dari salah satu bidang program pengembangan ekonomi kreatif. Dilihat dari sisi ekonomi, program ini dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sasaran, baik yang bekerja di perusahaan maupun yang akan berwirausaha di bidang ini.

Sedangkan dari sisi Iptek, jelas program ini membantu mereka untuk bisa menguasai dunia Iptek; (b) Bagi pemerintah, untuk pemerintah sendiri, jelas manfaat kegiatan ini membantu pemerintah dalam memberikan ketrampilan kerja bagi masyarakat. Selain itu kegiatan ini mendukung program ekonomi kreatif yang diagendakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pengembangannya pun di Indonesia ditargetkan hingga 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 memaparkan bidang – bidang yang termasuk dalam kegiatan ekonomi kreatif diantaranya adalah (1) arsitektur; (2) desain interior; (3) desain komunikasi visual; (4) desain produk; (5) film, animasi, dan video; (6) fotografi; (7) kriya; (8) kuliner; (9) musik; (10) *fashion*; (11) aplikasi dan *game developer*; (12) penerbitan; (13) periklanan; (14) televisi dan radio; (15) seni pertunjukan; dan (16) seni rupa (Subdirektorat Statistik Ekspor, 2017). Dengan adanya pelatihan ini tentu dapat menciptakan daya kreatif masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam sektor industri kreatif; dan (c) Bagi akademisi, akademisi sebagai pengabdian masyarakat dalam konteks Tridarma Perguruan Tinggi berperan sebagai fasilitator atas kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, maka para akademisi dapat melaksanakan salah satu dari filosofi Tridarma Perguruan Tinggi tersebut, dalam hal ini pengabdian masyarakat.

## Metode

Metode dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tim menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada peserta pelatihan. Pada kegiatan pelatihan, tim berusaha agar proses pelatihan berjalan secara komunikatif. Oleh karena itu metode pelatihan menggunakan sistem Tanya jawab. Hal ini dimaksudkan agar proses pelatihan berjalan secara maksimal, dan peserta pelatihan bisa bertanya lebih dalam mengenai seputar desain grafis maupun teknik mencetak digital. Agar kegiatan pelatihan berjalan efektif, maka tim menggunakan metode latihan atau praktek. Kegiatan praktek ini durasinya lebih banyak daripada teori. Dengan banyak praktek, diharapkan peserta bisa menguasai dasar dari desain grafis dan teknik cetak digital.

Sedangkan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui metode pendekatan pemberdayaan yang memberikan ketrampilan kepada masyarakat. Dalam pendekatan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting bahkan mutlak diperlukan. Karena pendekatan tersebut bertumpuh pada kekuatan masyarakat untuk secara aktif berperan serta dalam proses pemberdayaan secara menyeluruh. Partisipasi tidak hanya menjadi strategi dalam program pengembangan masyarakat, tetapi ia juga menjadi hasil yang sangat diharapkan dari pelaksanaan program pengembangan masyarakat ini. Adapun deskripsi secara rinci untuk pelaksanaan pelatihan desain grafis dan teknik cetak digital bagi remaja putus sekolah terbagi menjadi enam tahapan. Secara teknis keenam tahapan pelaksanaan kegiatan akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tahapan Pertama; Konsolidasi internal tim

Dalam melakukan persiapan kegiatan ini dibutuhkan suatu kesiapan mental dalam menjalankan kegiatan dengan melakukan perencanaan yang matang dan sharing dalam internal tim, serta

melakukan langkah-langkah strategi yang tepat dalam pelaksanaannya dan tidak kalah pentingnya menyamakan visi dan misi kegiatan yang akan dilaksanakan. Disisi lain dalam persiapan kegiatan sudah mempersiapkan segala literatur yang terkait untuk bahan modul pelatihan desain grafis yang nantinya akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan Tahapan Kedua; Melakukan pemetaan dan perizinan kegiatan

Setelah melakukan persiapan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pemetaan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran kegiatan. Dalam pemetaan ini dilakukan observasi untuk melihat karakteristik warga sekitar yang akan menjadi sasaran khususnya para remaja yang akan diberikan pelatihan desain grafis dan teknik cetak digital, disamping itu akan dilakukan dialog kecil atau sharing dengan warga sekitar dalam menemukan masalah yang nantinya akan menjadi acuan dalam metode yang akan digunakan, setelah melihat karakteristik dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Langkah selanjutnya yaitu meminta perizinan kepada birokrat setempat mulai dari tingkat RW sampai tingkat RT dengan menjelaskan maksud kegiatan yang akan dilaksanakan serta memberikan keyakinan kepada birokrat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakatnya serta dapat membantu permasalahan yang terjadi sebagai solusi efektif yang diberikan dalam penanganannya. Dalam hal perizinan ini dimaksudkan agar tim mendapat dukungan warga dalam berpartisipasi terhadap kegiatan khususnya bagi para orang tua untuk senantiasa memberikan izin kepada anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan yang telah direncanakan. Disamping itu pula perizinan teknis maupun peralatan diharapkan menjadi suatu titik awal kerjasama yang baik dalam meningkatkan tali silaturahmi.

3. Pelaksanaan Tahapan Ketiga; Persiapan teknis pelaksanaan kegiatan

Setelah diadakannya pemetaan serta perizinan yang telah dilakukan sebelumnya, tahap selanjutnya tim melakukan persiapan teknis untuk pelaksanaan kegiatan.

4. Pelaksanaan Tahapan Keempat

Pelaksanaan kegiatan pelatihan.

5. Pelaksanaan tahapan ke lima; Evaluasi kegiatan

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tindak kegiatan yang telah dilakukan, apakah sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan atau adanya suatu kekurangan dalam pelaksanaannya yang akan menjadi acuan perbaikan dalam kegiatan tindak lanjut berikutnya.

6. Pelaksanaan Tahapan Keenam; Pembuatan laporan kegiatan

Pada tahapan ini, tim melakukan pembuatan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban tim kepada pihak fakultas terkait perkembangan atau kemajuan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh tim.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Keberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan

Pada dasarnya pokok pikiran dari pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centered development*) diimplementasikan ke dalam sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengelola proses pembangunan sosial (Soetomo, 2011: 69). Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife dan Tisoriero (2006) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan

kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Sedangkan menurut Chambers (1995), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*". Kemudian menurut Payne (dalam Adi, 2013: 205-206), pemberdayaan masyarakat adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Sementara menurut Korten (dalam Soetomo, 2011: 88-89), memahami *power* atau *empowerment* tidak cukup dari dimensi distributif, akan tetapi juga dari dimensi generatif, karena suatu kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholder*. Sehubungan dengan hal ini, Korten (dalam Soetomo, 2011) pun menjelaskan bahwa proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat juga dapat dilakukan melalui identifikasi masalah dan kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian, melalui mekanisme ini dapat dikatakan bahwa proses pembangunan masyarakat berasal dari, oleh dan untuk masyarakat (Soetomo, 2011: 75).

Sementara menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun tujuan pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dilihat dari pemikiran yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan melakukan pemberdayaan, sekiranya model pemberdayaan masyarakat dinilai dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk dapat mengelola masa depannya. Singkatnya, proses pemberdayaan pun mengandung dua kecenderungan (Sumodiningrat, 1999). *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Kecenderungan ini disebut sebagai kecenderungan primer dari konsep pemberdayaan. *Kedua*, kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Kedua kecenderungan inipun mempunyai keterkaitan satu sama lain, di mana terwujudnya kecenderungan primer seringkali harus dimulai dengan adanya kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Sementara dalam kaitannya dengan proses pemberdayaan ini Priyono dan Pranarka (1996: 262) mengemukakan gerakan pemberdayaan dapat dilihat dari berbagai macam pola dan pendekatan, ada yang radikal dan ada yang moderat. Yang radikal bermaksud menjungkir balikan kondisi dan situasi. Sedangkan yang moderat berusaha mengadakan perubahan secara evaluatif. Kemudian menurut Kartasmita (1997: 11-12) memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Usman (2004: 20) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Kemudian tujuan pemberdayaan menurut Ife dan Tisoriero (2006), yaitu memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kelompok politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan penerima manfaat atas: (Ife dan Tisoriero, 2006)

- a. Pilihan personal dan kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerja.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Lembaga: kemampuan menjangkau menggunakan dan mempengaruhi pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- d. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- e. Sumber: kemampuan memobilisasi sumber formal, informal dan masyarakat.
- f. Aktifitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Sementara menurut Hogan (dalam Adi, 2013: 212), pemberdayaan masyarakat terdapat lima tahapan, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan;
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan;
- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek;
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan;
- e. Mengembangkan rencana aksi dan mengimplementasikannya.

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memiliki keberdayaan. Dimana keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang mampu dikatakan berdaya jika mereka memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat dan terdidik (Kartasmita, 1997). Bukan itu saja yang menjadi sumber keberdayaan bagi masyarakat, nilai kekeluargaan dan gotong royong juga menjadi poin di dalam membentuk keberdayaan masyarakat. Masyarakat yang berdaya akan membentuk keberdayaan di segala aspek kehidupan, hingga pada akhirnya masyarakat akan lebih mandiri. Ini yang menjadi titik akhir dari pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. UNICEF (2012) mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

a. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

b. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

c. Kesadaran kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

d. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

e. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan indikator di atas, menurut UNICEF (2012) indikator keberhasilan tersebut berusaha mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat dan ditandai kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya, kekuatan atau kemampuan yang dimiliki. Daya, kekuatan atau kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material. Pencapaian tujuan tersebut tentu tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan upaya dan kerja keras yang serius dari semua pihak yang dalam penelitian ini disebut sebagai pelaku pemberdayaan. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator dan fasilitator yang baik.

Adapun para pelaku pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan sosial menurut Midgley (2005: 150-183), diantaranya:

- a. Pembangunan sosial melalui individu (*Social Development by Individuals*). Dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individualis atau perusahaan (*individualist or enterprise approach*);
- b. Pembangunan Sosial melalui Komunitas (*Social Development by Communities*). Dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*); dan
- c. Pembangunan Sosial melalui Pemerintah (*Social Development by Governments*), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*government agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).

Pada era reformasi dan desentralisasi saat ini tuntutan terhadap pelaku pemberdayaan yang memiliki kemampuan yang memadai semakin menguat. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperkaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain program pemberdayaan. Lantas muncul pertanyaan, kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdayaan?. Menurut Tjokrowinoto (2002) bentuk kemampuan yang dianggap sangat relevan dengan kualitas pelaku pemberdayaan, yakni:

- a. Kemampuan Untuk Melihat Peluang-Peluang Yang Ada;

- b. Kemampuan Untuk Mengambil Keputusan Dan Langkah-Langkah Yang Dianggap Prioritas Dengan Mengacu Pada Visi, Misi Dan Tujuan Yang Ingin Dicapai;
- c. Kemampuan Mengidentifikasi Subjek-Subjek Yang Mempunyai Potensi Memberikan Input Dan Sumber Bagi Proses Pembangunan;
- d. Kemampuan Menjual Inovasi Dan Memperluas Wilayah Penerimaan Program-Program Yang Diperuntukkan Bagi Kaum Miskin; Dan
- e. Kemampuan Memainkan Peranan Sebagai Fasilitator Atau Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Untuk Tumbuh Berkembang Dengan Kekuatan Sendiri.

Keterpaduan kelima kemampuan pelaku pemberdayaan tersebut patut dijadikan rujukan atau pedoman oleh seluruh unsur *stakeholders*, terutama yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap keberhasilan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Namun dukungan kelima kemampuan ini pun tidak akan berarti kalau tidak disertai dengan sikap perilaku adil dan komitmen yang kuat. Sementara itu Owin (2004) menambahkan bahwa ada tujuh syarat kemampuan umum yang harus dimiliki pelaku pemberdayaan dan kesemuanya harus terefleksi dalam kegiatan aksi program, yakni kemampuan untuk: (1) mempertahankan keadilan, (2) mempertahankan kejujuran, (3) melakukan *problem solving*, (4) mempertahankan visi-misi, (5) memfasilitasi, (6) menjual inovasi, dan (7) fasilitasi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri.

Berkaitan dengan tugas pelaku pemberdayaan sebagai fasilitator, Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) memberikan kerangka acuan sebagai berikut;

- a. Mendefinisikan Siapa Yang Akan Dilibatkan Dalam Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Mendefinisikan Tujuan Keterlibatan;
- c. Mendorong Komunikasi Dan Relasi, Serta Menghargai Pengalaman Dan Perbedaan-Perbedaan;
- d. Memfasilitasi Keterikatan Dan Kualitas Sinergi Sebuah Sistem: Menemukan Kesamaan Dan Perbedaan;
- e. Memfasilitasi Pendidikan Membangun Pengetahuan Dan Keterampilan;
- f. Memberikan Contoh Dan Memfasilitasi Pemecahan Masalah Bersama Mendorong Kegiatan Kolektif;
- g. Mengidentifikasi Masalah-Masalah Prioritas Yang Akan Dipecahkan Bersama Dan Memfasilitasi Penetapan Tujuan;
- h. Merancang Solusi-Solusi Alternatif;
- i. Mendorong Pelaksanaan Tugas; dan
- j. Memecahkan Konflik/Masalah.

## **b. Analisis Capaian Hasil Kegiatan Pelatihan**

Dari beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan ini, hasil yang dicapai secara garis besar cukup memberi dampak yang signifikan terhadap remaja yang mengikuti pelatihan desain grafis dan teknik cetak digital. Dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat secara aktif mendukung kegiatan ini. Sehingga tim tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun secara rinci, penjelasan mengenai capaian yang didapat beserta analisisnya dari beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Capaian Hasil Tahap I**

Terciptanya suatu persamaan visi dan misi diantara kelompok kerja atau tim, serta kesiapan mental dalam menjalankan kegiatan dengan melakukan perencanaan yang matang dan sharing

dalam intern tim, serta melakukan langkah-langkah strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Selain itu dalam capaian tahap 1 ini, tim berhasil membuat silabus dan modul pelatihan.

## 2. Capaian Hasil Tahap II

Adanya pemetaan karakteristik masyarakat sasaran. Sehingga tim mendapat informasi tentang masyarakat sekitar, yang kemudian ini menjadi referensi tim dalam menentukan pendekatan pelatihan yang dilakukan. Pada tahap ini tim juga mulai menjalin interaksi dengan ketua RT, RW dan masyarakat sasaran. Selain itu pada tahapan ini, tim pun membuat berbagai surat perizinan dalam pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak yang terkait.

## 3. Capaian Hasil Tahap III

Pada tahap ini tercapainya negosiasi penyewaan rental komputer sebagai tempat pelatihan, memperbanyak bahan silabus dan modul pelatihan, serta pembelian serta penyewaan bahan dan alat untuk kegiatan pelatihan teknik cetak digital, seperti pembelian kaos polos, paper glossy, dan penyewaan printer khusus cetak paper glossy dan alat pemanas kertas.

## 4. Capaian Hasil Tahap IV

Terlaksananya pelatihan desain grafis dan teknik cetak digital. Dalam pelaksanaan kegiatan, antusias yang cukup tinggi dari para peserta pelatihan. Sehingga tercipta kepuasan tersendiri baik bagi peserta maupun tim sendiri. Dari pelatihan terlihat adanya suatu penambahan dan peningkatan ketrampilan para peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan desain garfish dan cetak digital.

Membantu pemerintah setempat dalam menangani keterbatasan ketrampilan kerja para remaja di RT. 006, RW 014 yang putus sekolah. Dalam hal ini melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh tim membantu menambah ketrampilan kerja para remaja setempat yang putus sekolah. Sehingga ketrampilan ini nantinya dapat menjadi modal mereka dalam mencari pekerjaan.

## 5. Capaian Hasil Tahap V

Adanya suatu konsep yang telah disempurnakan terhadap kegiatan yang dianggap perlu diperbaiki dan meminta saran dan kritik dari peserta dalam setiap kegiatan secara mendetail selama kegiatan pelatihan berlangsung. Dari hasil evaluasi kegiatan, secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Hal ini dibuktikan dari pendapat para peserta dalam kuesioner. Selain itu adanya suatu ikatan silaturahmi antara institusi kampus dengan masyarakat sasaran.

## 6. Capaian Hasil Tahap IV

Selesainya laporan kegiatan pengabdian masyarakat dan kemudian diserahkan kepada pihak fakultas sebagai bentuk pertanggungjawaban tim dalam melaksanakan kegiatan ini.

Secara umum substansi dari capaian kegiatan berjalan dengan lancar dan berhasil. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari ketercapaian tujuan pelatihan, tetapi juga kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan tersebut. Tanggapan dari para peserta sangat positif di mana seluruh peserta merasakan manfaat yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini. Secara umum, para peserta berpendapat bahwa kegiatan *workshop* ini bermanfaat dalam hal:

1. Memperluas wawasan dan pemahaman peserta mengenai peluang usaha bisnis ditengah keterbatasan latarbelakang pendidikan peserta.
2. Membantu peserta dalam memberikan ketrampilan tambahan dalam bidang komputer dan desain grafis serta cetak digital.
3. Memberikan kesadaran kepada peserta untuk mengedepankan semangat belajar dan berusaha dalam mencapai kesuksesan hidup ditengah keterbatasan latarbelakang pendidikan mereka.

## Simpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat tim ambil dari pelaksanaan kegiatan pelatihan desain grafis ini sebagai berikut: Pelatihan desain grafis sebagai kegiatan peningkatan ketrampilan kerja bagi remaja putus sekolah di RT.006 RW.014 Cengkareng Barat Jakarta Barat dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga dapat menyadarkan masyarakat khususnya para orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Pelatihan desain grafis yang menggunakan pendekatan masyarakat dari bawah (*bottom up Strategy*) dengan lebih mengutamakan partisipasi ini mampu meningkatkan ketrampilan kerja para remaja yang putus sekolah melalui pelatihan desain grafis dan teknik cetak digital. Pelatihan desain grafis ini menjadi perwujudan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi para sivitas akademik UNJ. Selain dapat menerapkan keilmuan yang dipelajari diruang kuliah, dilapangan juga dapat menumbuhkan kesadaran untuk peduli terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di RT.006 RW.014 Cengkareng Barat Jakarta Barat.

## Referensi

- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Intervensi komunitas: pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Alamsyah, Cipi Yusran. (2015). *Praktik pekerja sosial generalis suatu tuntutan intervensi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Carlos, Lasso-Urbano. (2021). Significant contributions of the community intervention process with the "escuela popular de comunicación alternativa jaime garzón" in the city of cúcuta, colombia, in *Prospectiva, Iss 31, Pp 259-279*. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i31.10467>.
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, (2008). *Pengembangan ekonomi kreatif indonesia 2025*. Jakarta: Departemen Perdagangan RI.
- Ife, Jim, dan Tisoriero, Frank. (2006). *Community development (alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Pemberdayaan masyarakat: konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Kenny, S. (2011). *Developing communities for the future*. Melbourne: Thomson.
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan sosial: perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Jakarta: DITPERTA DEPAG RI.
- Owin, Jamasy. (2004). *Keadilan, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: Blantika Mizan.
- Pangestu, Mari Elka (2008). *Pengembangan ekonomi kreatif indonesia 2025*, disampaikan dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 yang diselenggarakan pada Pekan Produk Budaya Indonesia 2008, JCC, 4 -8 Juni 2008.
- Parsons, Ruth J., Jorgensen, James D., and Hernandez, Santos H.. (1994). *The integration of social work practice*. California: Wadsworth, Inc.
- Prijono, Onny S, dan Pranaka, AMW (ed). (1996). *Pemberdayaan konsep dan implementasi*. Jakarta: CSIS

- Saksono, Herie. (2012) Ekonomi Kreatif : Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah, *dalam Jurnal Bina Praja Vol. 4 No. 2, pp. 93-103.*
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan masyarakat: mungkinkah muncul antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (2002). *Pembangunan dilema dan tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNICEF. (2012). *Indonesia Laporan Tahunan*. Geneva: UNICEF.